



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/6/2021
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN PERUBAHAN RPJMD KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Walikota Madiun telah mengajukan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka dalam pembahasan oleh DPRD perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
-

10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 27 April 2021 Nomor 170/980/401.040/2021 dengan acara Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun 27 April 2021 Nomor 170/978a/401.040/2021 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 3. Surat Walikota Madiun tanggal 29 April 2021 Nomor 050/1447/401.204/2021 Perihal Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 4. Surat Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 3 Mei 2021 Nomor 006/F.PDIP/V/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 5. Surat Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 3 Mei 2021 Nomor 04/F.Demokrat/V/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 6. Surat Ketua Fraksi Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 3 Mei 2021 Nomor 07/F.Perindo/VI/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 7. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun 3 Mei 2021 Nomor

- 06/F.PKS-PAN/VI/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
8. Surat Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tanggal 3 Mei 2021 Nomor 04/F.PKB/VI/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 9. Surat Ketua Fraksi MANTAB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tanggal 3 Mei 2021 Nomor 04/F.MANTAP/VI/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 10. Surat Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tanggal 3 Mei 2021 Nomor 04/F.Gerindra/VI/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 11. Hasil Rapat Paripurna tanggal 3 Mei 2021 dengan acara Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum "KESATU" adalah:

1. melaksanakan pendampingan pengkajian dan pembahasan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tenaga ahli;
2. membahas Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan Tim Harmonisasi dan

Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD terkait;

3. melaksanakan pendampingan pengkajian pembahasan dan finalisasi pembahasan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tenaga ahli;
4. membahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun No 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan Tim Harmonisasi dan pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD terkait; dan
5. menyusun Laporan Hasil Kerja Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

KETIGA

: Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 6 bulan (enam bulan) mulai tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 3 November 2021 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.

KEEMPAT

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 3 Mei 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**
Ketua

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/6/2021
TANGGAL : 3 MEI 2021

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD
PEMBAHASAN PERUBAHAN RPJMD KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

1. Ketua : Drs. SUGENG, S.H., M.H
2. Wakil Ketua : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si.
3. Anggota : Drs. SUTARDI
4. Anggota : YULIANA
5. Anggota : ERLINA SUSILORINI S.Si., Apt., M.M
6. Anggota : H. NGEDI TRISNO Y, S.H., M.Hum.
7. Anggota : TUTIK ENDANG SRIWAHYUNI
8. Anggota : F. BAGUS PANUNTUN
9. Anggota : RINA HARIYATI, S.T., M.M.
10. Anggota : Drs. SUBYANTARA
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.